

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CITRA POLISI LALU LINTAS DI POLSEK KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Oleh :
Vania Avissa Wardani
Email : vaniaavisawardani@yahoo.com

Pembimbing : Yoskar Kadarisman

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Facs. 0761 – 63277

ABSTRAC

There were many phenomenons that deserved to be researched, one of the phenomenons was a bribe exploits in arresting every vehicles. That was certainly giving a positive and negative effect for the traffic warden image that was not ready been a discipline in a rule of law equity yet.

To know the result of this research, that is the reason why the researcher applied the collecting data technique by applying the observation technique and interviewing the respondents. There was a way by assuming the sample or the respondents treated with the Accidental Sample Technique, which was a stipulation by the respondents treated so spontaneously by people as bikers that interviewed on highway directly. The respondents amounted to 36 persons. The researcher has totalled the deduction of 36 persons based on the level of final data when the rejoinder was almost being homogeny and the researcher satisfied to expect the information. The kind of this research used by the researcher here is the descriptive quantitative research.

The result of this research indicated that it was sealed for the bribe exploits in arresting many vehicles were actually happened. So that the people perception for the traffic warden image became a negative thing, moreover a few people were perceptive in a positive thinking. It could be seen with the perception factors, such as the individual experience, the people experience, an interesting and a particular attention from the societies.

The result of this research is expected to point out a general description for the readers to collect the information about The People Perception for the Traffic Warden Image in the Sector Police of Tampan Pekanbaru.

Keywords: Perception, Society, The Traffic Warden Image

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kecenderungan lain yang tampak dalam kenyataan adalah, bahwa para penegak hukum lebih mementingkan kedudukan

daripada peranannya. Kenyataan demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan besar untuk menegakan hukum yang adil secara terpadu. Tekanan pada kedudukan disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah pengaruh dan persepsi negatif (Ronny, 2002).

Pandangan masyarakat terhadap keefektifan kinerja polisi juga memberi kontribusi cukup signifikan dalam citra kepolisian sebagai aparat keamanan yang mampu mengemban tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya terhadap bangsa dan Negara

Tidak dapat dipungkiri citra polisi dalam masyarakat Indonesia belum menemukan bentuknya yang jelas. Khususnya pada polisi lalu lintas yang dalam menjalankan tugas mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi lalu lintas lebih dekat dengan masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (Lubis, 1988).

Dapat dijabarkan dalam beberapa kasus yang harusnya diselesaikan dengan baik oleh polisi, justru malah mempertegas anggapan masyarakat bahwa polisi semakin tidak dapat mengayomi dan tidak dapat

bertindak adil. Polisi kemudian berubah menjadi sosok yang menakutkan. Fenomena ini tidak sejalan dengan tugas polisi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya memberi perlindungan serta rasa aman dan nyaman, serta mengayomi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi itu tidak sepenuhnya karena kesalahan polisi, melainkan juga karena dilema-dilema yang dihadapi oleh polisi ditengah masyarakat yang selalu mengalami perubahan serta tak terlepas dari beragam masalah yang kompleks.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi lalu lintas adalah adanya kesenjangan persepsi masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi sekarang di masyarakat. Masyarakat mengharapkan kehadiran polisi akan membawa ketentraman, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas, dan mencari sebab timbulnya persepsi masyarakat tersebut, karena persepsi masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen strategi kepolisian.

Setelah sekitar empat belas tahun Polri pisah dari TNI, masyarakat

tentunya dapat memberikan persepsi atas kinerja polisi setelah terjadinya reformasi dalam tubuh Polri dengan dilatar belakangi masalah kepolisian di jaman orde baru.

Dapat dilihat dari fenomena nasional, suap dalam pelayanan public masih banyak dijumpai dalam berbagai jenis pelayanan public. Ada banyak faktor yang menyebabkan suap dalam birokrasi menjadi fenomena yang lazim didalam praktik pelayanan public di Indonesia. Bahkan ada juga yang menganggap fenomena suap tersebut sebagai sesuatu yang menguntungkan.

Penuturan seorang masyarakat Jawa Tengah (Data Kualitatif GDS, 2002) dalam Reformasi, 2003 :

“Zaman sekarang ini masih adabudaya suap. Suap dalam hal ini, selain sebagai usaha untuk memperlancar prosedur juga sebagai ucapan terima kasih. Kalau dulu sebelum reformasi, sudah harus menyuap, prosedurnya berbelit-belit pula. Sekarang lebih enakan, walaupun harus ngasih uang rokok segala. menurut saya, aparat itu dalam melayani memang terkesan mencari-cari kesempatan supaya dapat uang tambahan. Ada saja alasannya, untuk biaya stempel, pokoknya kelihatan sekali kalau dicari-cari dan tidak ada dalam peraturan. Keadaan birokrasi pelayanan kita memang sudah akut, apalagi ditambah dengan tidak adanya pengawasan. Wah, semakin akut saja” (Reformasi, 2003).

Dari sisi petugas pemberi pelayanan, fenomena suap dalam pelayanan public diakui tidak hanya disebabkan dari permintaan petugas pelayanan semata untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun juga karena adanya dorongan dari masyarakat yang menginginkan agar urusannya segera selesai.

Di dalam kepolisian, suap biasanya bermula ketika terjadi tindak pelanggaran hukum yang diselesaikan dengan cara-cara diluar hukum yang berlaku. GDS 2002 menunjukkan bahwa cara-cara tersebut, antara lain, melalui pemerasan, menyelesaikan kasus secara pilih kasih, ataupun melalui “musyawarah”.

Berangkat dari sejarah dan fenomena tersebut, penulis merasa perlu mengkaji sejauh apa masyarakat menilai kinerja Polisi di Kota pekanbaru dalam menjalankan fungsi yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Bagaimana polisi yang harusnya menjadi mitra dan pelindung masyarakat memberikan pengabdian. Hal tersebut sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti masalah yang diberi judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Citra Polisi Lalu Lintas di Polsek Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

1.2. Perumusan masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang citra polisi lalu lintas di Polsek kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang membentuk persepsi masyarakat terhadap citra polisi lalu lintas di Polsek Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, secara spesifik penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap citra polisi lalu lintas di Polsek

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membentuk persepsi masyarakat terhadap citra polisi lalu lintas di Polsek Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu sosiologi itu sendiri
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mempelajari kajian sosiologis mengenai Kepolisian khususnya yang berkaitan dengan polisi lalu lintas
3. Untuk menambah pengetahuan pembaca dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat lain yang melakukan penelitian serupa secara lebih luas.

KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Persepsi

Menurut Wade Carole dan Travis Carole (2008 : 193-194) persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola yang memiliki makna. Tidak jarang sebuah gambaran sensorik dapat menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan Kartono (1986 : 151) menjelaskan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk melihat dan menanggapi realitas nyata.

Krech menyimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik mengenai sesuatu yang

mungkin sangat berbeda dari kenyataannya (Thoha, 1983 : 141-142). Lebih lanjut, Duncan merumuskan persepsi dengan berbagai cara, persepsi diartikan sebagai yang lebih dari sekedar mendengar, melihat atau merasakan sesuatu. Menurut guru besar Universitas of Alabama ini, persepsi yang signifikan itu adalah jika diluar jangkauan lima indera. Dan jika persepsi dimaksudkan sebagai indera keenam, maka menurut Luthans, belum ada kesepakatan yang penuh diantara para ahli tentang indera keenam tersebut (Thoha, 1983 : 142-143).

Persepsi ditentukan oleh beberapa faktor. Krech dan Cruthfield (1997: 235) sebagaimana dikutip oleh Rachmat (2005) menyebutkan faktor fungsional dan faktor structural, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Faktor fungsional

Berdasarkan hal di atas, Krech dan Cruthfield dalam Rakhmat (2005) merumuskan dalil persepsi yang pertama : persepsi yang bersifat selektif secara fungsional, artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi individu biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Contohnya : pengaruh kebutuhan kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi titik.

b. Faktor struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Teori Gestalt merupakan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural yang dirumuskan oleh para psikolog, teori ini menyatakan bahwa Gestalt (1959) apabila individu mempersepsikan sesuatu, maka individu tersebut mempersepsikannya secara keseluruhan, tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.

Persepsi manusia terbagi dua, yakni persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi sosial).

a. Persepsi Terhadap Lingkungan Fisik (Objek)

Persepsi terhadap lingkungan fisik merupakan persepsi terhadap objek melalui lambing-lambang fisik. Persepsi terhadap objek adalah persepsi yang menanggapi sifat-sifat luar. Kebanyakan objek tidak mempersepsikan individu ketika individu tersebut mempersepsikan objek-objek tersebut.

b. Persepsi Terhadap Manusia (Persepsi Sosial)

Persepsi sosial merupakan suatu proses dalam menangkap arti dari objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu lingkungan. Berikut prinsip penting dalam persepsi sosial.

Menurut Gibson, dkk (1989) dalam Jiang Rinto (2009) faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. **Faktor Internal** yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :
 - Pengalaman
 - Fisiologis
 - Minat
 - Kebutuhan yang searah
 - Perhatian Khusus
 - Suasana hati
2. **Faktor Eksternal** yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana

seseorang merasakannya atau menerimanya.

- Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus
- Warna
- Keunikan dan kekontrasan stimulus
- Intensitas
- Motion atau gerakan

Yusmar yusuf (1991 : 108) menjelaskan bahwa persepsi merupakan “pemaknaan hasil pengamatan” termasuk lingkungan yang menyeluruh, lingkungan dimana individu berada dan dibesarkan, dan kondisi merupakan untuk persepsi.

2.2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah elemen terpenting dalam interaksi dan pola hubungan sosial. Menurut Kingsley Davis, Masyarakat adalah kelompok sosial terkecil yang bertempat tinggal didaerah tertentu yang didalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan. Philip Roup juga mengemukakan masyarakat merupakan kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri : kesamaan tempat tinggal, kesamaan sistem nilai, kesamaan aktivitas dan pola tingkah laku (Ngadiyono, 1994 : 15)

Menurut Mayo (1998 : 162) sebagaimana dikutip oleh Suharto (2005) mengklasifikasi kan masyarakat kedalam dua konsep. Pertama, masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni di sebuah wilayah geografis yang sama. Kedua, masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

2.3. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan

Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2.4. Pengertian Citra polisi

Citra adalah gambaran atau bayangan yang dihasilkan oleh suatu objek yang memperlihatkan suatu keadaan (Nur Kholif Hazin, 2003). Citra Polisi lalu lintas di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum secara transparan. Di dalam Rencana Strategis Polri (Renstra Polri) secara tegas dinyatakan, bahwa strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan dengan optimal tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU kepolisian.

2.5. Konsep Operasional

Konsep adalah sesuatu yang mengungkapkan pentingnya gejala, agar gejala yang dimaksud dapat jelas dan terbentuk secara sistematis. Maka dalam penelitian ini peneliti memberi batasan konsep :

1. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penilaian seseorang terhadap citra polisi lalu lintas di wilayah polsek kecamatan Tampan.

2. Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama.
3. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa individu pengguna sepeda motor di wilayah polsek kecamatan Tampan yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Tampan dengan klasifikasi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.
5. Polisi Lalu Lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah polisi lalu lintas yang berada di pos polisi wilayah polsek kecamatan tampan maupun polisi lalu lintas yang berada di jalan raya wilayah tersebut.
6. Citra polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran yang ditangkap oleh masyarakat pengguna sepeda motor dipolsek kecamatan Tampan tentang kinerja polisi sesuai dengan tugas dan wewenang polisi lalu lintas

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Polsek Tampan, hal ini dilakukan karena Polsek Tampan merupakan polsek yang berada pada wilayah yang sedang berkembang, yang selalu di hadapkan dengan masalah kemacetan, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan sepeda motor.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik berupa manusia, gejala, nilai, benda-benda atau peristiwa (Nasution, 2003). Yang menjadi objek didalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya pengendara sepeda motor di polsek kecamatan Tampan.

3.3. Jenis Data

Penelitian memerlukan data yang dapat membantu pengumpulan data lapangan. Data terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari responden yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data primer ini berisi tentang persepsi masyarakat, identifikasi responden, pekerjaan pokok, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Data primer dikumpulkan dari beberapa informasi penting dari instansi terkait seperti kantor polisi, kecamatan, kelurahan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan juga literature yang berhubungan langsung atau tidak.

3.4. Teknik Pengumpulan Data'

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik observasi

dan wawancara. Teknik observasi adalah pengamatan langsung dilapangan, mengenai kondisi lokasi penelitian.

Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka, dengan kata lain peneliti menanyakan hal-hal yang perlu memberikan sepenuhnya kepada responden untuk menjawab tanpa dipengaruhi.

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir penelitian, dilakukan dengan proses pengorganisasian dan mengurutkan data penelitian kedalam pola, kategori dan satuan uraian data sehingga dapat dikehakui dari penelitian dengan masalah yang telah ditetapkan. Analisi data dilakukan secara kuantitatif yang dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan member gambaran mengenai keadaan masyarakat sebenarnya.

GAMBARAN UMUM POLISI SEKTOR TAMPAN

4.1. Wilayah Polisi Sektor Tampan

Luas wilayah hukum polisi sektor Tampan Pekanbaru yang terdiri dari 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan dengan luas 59,81 KM² yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan.

4.2. Struktur Organisasi Polisi Sektor Tampan

4.3. Jumlah Personil Polisi Sektor Tampan

Secara keseluruhan, polisi sektor Tampan memiliki 107 personil yang terdiri dari beberapa unit bagian tugas dalam menjalankan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.4. Satuan Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, personil kepolisian di kelompokkan dalam beberapa unit yang tiap-tiap unitnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

4.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

Dasar hukum pelaksanaan tugas merupakan peraturan resmi yang menaungi setiap kegiatan maupun tugas polisi lalu lintas serta menjadi landasan polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas. Adapun jenjang dasar pelaksanaan hukum polisi lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

4.6. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

SIM di gunakan sebagai tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang di tentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLISI LALU LINTAS

Polisi lalu lintas sebagai aparat keamanan yang menangani masalah berlalu lintas, mempunyai tugas yang relative penting. Menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi polisi lalu lintas dapat dilakukan melalui suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang dalam penelitian ini di khususkan untuk pengguna kendaraan roda dua. Hasil penelitian terhadap masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1. Identitas Responden

5.1.1. Umur Responden

Berdasarkan hasil penelitian maka umur responden dapat di kategorikan ke dalam 4 (empat) kelompok umur yaitu responden yang berumur antara 20 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun dan responden yang berumur di atas 50 tahun.

5.1.2. Etnis Responden

Berdasarkan hasil penelitian maka etnis responden dapat di kategorikan ke dalam 5 (lima)

kelompok etnis yaitu responden dengan etnis minang, melayu, jawa, batak dan sunda.

5.1.3. Agama Responden

Mayoritas responden adalah beragama islam, yaitu sebanyak 30 orang (83,3 %). Dan sebagian lagi beragama Kristen protestan sebanyak 6 orang (16,7 %).

5.1.4. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil penelitian maka jenis pekerjaan responden dapat di kategorikan ke dalam 5 (lima) kelompok pekerjaan yaitu responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Buruh, Guru dan Mahasiswa

5.1.5. Jumlah Pendapatan Responden

Berdasarkan hasil penelitian maka jenis pekerjaan responden dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok jumlah pendapatan yaitu responden yang memiliki pendapatan sebesar Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 per bulan, responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp.2.000.000 – Rp.4.000.000 per bulan, dan responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp.4.000.000 perbulan.

5.2. Sikap dan Persepsi Terhadap Citra Polisi

Sikap adalah evaluasi umum yang di buat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu. Sikap dapat berupa reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek atau lingkungan di tempat ia berada. Dalam pengertian serupa, sikap merupakan pandangan-pandangan atau perasaan yang di sertai

kecenderungan untuk bersikap sesuai apa yang di lakukan objek.

Hubungan timbal balik antara sikap dan persepsi sangat erat kaitannya yaitu, sikap yang ditangkap oleh seseorang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Sebab dalam persepsi terkandung 2 unsur penting, yaitu harapan dan kenyataan. Selanjutnya, persepsi secara tidak langsung akan mempengaruhi cara seseorang bersikap dan berperilaku terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Untuk lebih dapat memahami keterkaitan diatas, dapat di gambarkan melalui tabel berikut.

5.2.1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Polisi Lalu Lintas

No.	Pengetahuan Tentang Polisi Lalu Lintas	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	36	100,0
2.	Tidak tahu	0	00,0
Total		36	100,0

Sumber : Data primer, 2014

Keseluruhan responden (100,0 %) mengetahui adanya perbedaan antara polisi lalu lintas dengan polisi yang non-lalu lintas, hal ini memberikan gambaran bahwa sosok polisi lalu lintas sudah sangat dikenal dan diketahui oleh pengendara sepeda motor, maka di harapkan responden dapat memberikan jawaban sebagai informasi akurat tentang hal-hal yang di perlukan dalam penelitian ini.

5.2.2. Interaksi Masyarakat Dengan Polisi Lalu Lintas

No.	Pengalaman Berinteraksi Dengan Polisi Lalu lintas	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	36	100,0
2.	Tidak pernah	0	00,0
Total		36	100,0

Seluruh responden (100,0 %) menyatakan pernah berinteraksi dengan polisi lalu lintas, hal ini memberikan gambaran bahwa paling tidak responden sudah mengetahui sikap dan perilaku seorang polisi lalu lintas ketika memberikan pelayanan publik serta menindak setiap pelanggaran. Dengan adanya proses interaksi, responden sudah tentu mampu dan tidak ragu dalam memberi penilaian berdasarkan pengalaman, baik yang di lihat, di dengar dan di alami oleh responden sendiri maupun di lihat dan di alami oleh orang lain.

5.2.3. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Responden

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

No.	Kepemilikan SIM	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	36	100,0
2.	Tidak	0	00,0
Total		36	100,0

Seluruh responden (100,0 %) telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini memberi gambaran bahwa responden sudah taat memenuhi satu syarat penting dalam berkendara.

Yang artinya responden yang akan menjadi pemberi persepsi telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengendarai sepeda motor, termasuk peraturan dan pelanggaran apa saja yang harus di hindari.

5.2.4. Pengalaman di Tilang

No.	Kepemilikan SIM	Pengalaman Ditilang		Total
		Pernah	Tidak Pernah	
1.	Ada	35	1	36
2.	Tidak Ada	0	0	0
Total		35	1	36

Kelompok yang paling banyak memiliki pengalaman tilang adalah responden yang telah memiliki SIM yaitu sebanyak 35 orang (97,2 %), Hal ini menggambarkan bahwa kesalahan dan pelanggaran atas aturan bisa di lakukan oleh siapa saja, bahkan oleh individu yang sudah mengetahui peraturan yang harus ditaati. Sisanya hanya 1 orang (2,8 %) yang belum pernah di tilang. Kenyataan ini memberi gambaran bahwa pengendara sepeda motor cukup lalai dalam mentaati peraturan.

5.2.5. Membujuk Polisi Lalu Lintas Untuk Berdamai (Sogok) Di Tempat

No.	Berusaha Membujuk Polisi Lalu Lintas Berdamai	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	24	66,7
2.	Tidak Pernah	12	33,3
Total		36	100,0

Jumlah terbanyak adalah responden yang pernah berusaha membujuk polisi lalu lintas untuk berdamai (sogok) di tempat, yaitu sebanyak 24 orang (66,7 %). Hal ini menggambarkan bahwa sudah terbentuk krisis kepercayaan responden terhadap

polisi lalu lintas. Responden dengan berani telah memberi ruang kepada terciptanya budaya sogok-menyogok yang jelas akan merusak moral bangsa dan mengganggu stabilnya keteraturan umum.

5.3. Faktor-Faktor Yang Membentuk Persepsi Masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gibson, dkk (1989) dalam Jiang Rinto (2009) faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi meliputi beberapa faktor antara lain pengalaman baik langsung maupun pengalaman yang di dapat dari orang lain, fisiologi, psikologis, minat dan perhatian khusus.

5.3.1. Pengalaman Dengan Polisi Lalu Lintas

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu akan sesuatu hal. Dalam penelitian ini, pengalaman menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembentukan persepsi. Hal ini dikarenakan, semakin banyak responden memiliki pengalaman dengan polisi lalu lintas, maka semakin cermat dan paham responden dalam memberikan persepsi.

Dari 36 orang responden sebagian besar pernah mempunyai pengalaman baik dengan polisi lalu lintas (69.4 %) sedangkan responden yang tidak menjawab (30,6 %) responden tidak menjawab. Dari 69,4 % responden yang pernah mempunyai pengalaman yang baik dengan polisi menyatakan pengalaman baik dengan polisi lalu lintas tersebut berupa tidak di tilang saat melanggar peraturan lalu

lintas, yaitu sebanyak 12 orang (33,3 %) responden. Hal ini menggambarkan bahwa responden justru memandang polisi yang baik adalah polisi yang tidak menjalankan peraturan lalu lintas dengan benar. Sementara menurut ketentuan hukum yang sebenarnya. Tindakan polisi yang seperti demikian adalah bentuk ketidak disiplin polisi lalu lintas dalam menindak suatu pelanggaran lalu lintas.

5.3.2. Mendengar Pengalaman Orang Lain Mengenai Polisi Lalu Lintas

No.	Bentuk Pengalaman Yang Di Ceritakan Orang Lain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menilang Dengan Kasar	6	16,7
2.	Meminta Uang Damai Saat Menilang	24	66,6
3.	Tidak menjawab	6	16,7
Total		36	100,0

Sumber : Data primer, 2014

Mayoritas responden yaitu sebanyak 30 orang (83,3 %) menyatakan pernah mendengar pengalaman orang lain mengenai perlakuan polisi lalu lintas. Dari pernyataan responden, pengalaman yang di ceritakan bukan pengalaman baik, tapi justru pengalaman tidak menyenangkan. Sebanyak 6 orang (16,7 %) responden menyatakan mendengar pengalaman orang lain yang di perlakukan kasar oleh polisi lalu lintas ketika di tilang. Dan sebanyak 24 orang (66,6 %) responden menyatakan mendengar pengalaman orang lain yang dimintai uang damai (sogok) oleh polisi ketika di tilang. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena sogok menyogok dalam proses penilangan bukan lagi hal langka dalam masyarakat. Fenomena ini bahkan berkembang dari mulut ke mulut. Mendengar pengalaman orang

lain mampu menjadi sugesti bagi responden sehingga terpengaruh untuk memberi persepsi buruk terhadap polisi lalu lintas.

5.3.3. Melihat Hal Yang Berkaitan Dengan Perilaku Polisi Lalu Lintas

Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja, ada berbagai proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk bisa berpersepsi. Salah satu proses tersebut adalah proses fisiologis, yaitu ketika stimulus suatu objek diterima oleh alat indera (dalam hal ini mata), peristiwa, atau hubungang-hubungan antar gejala yang kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris.

No.	Melihat Bantuan Polisi Lalu Lintas Kepada Pengguna Jalan	Frekuensi	Persentase
1.	Membantu pejalan kaki menyebrang	14	38.9
2.	Memberi informasi arah jalan yang benar	6	16.7
3.	Membantu pengendara yang sepeda motornya mogok	4	11.1
4.	Membantu saat terjadi kecelakaan	11	30.6
5.	Tidak menjawab	1	2.7
Total		36	100.0

Sumber : Data primer, 2014

Bahwa mayoritas responden (97,3 %) menyatakan pernah melihat polisi lalu lintas ketika sedang membantu pengguna jalan raya, baik pengendara kendaraan bermotor roda empat dan rodan dua, maupun para pejalan kaki. Sebanyak 14 orang responden (38,9 %) menyatakan pernah melihat polisi lalu lintas membantu pejalan kaki yang kesulitan menyebrang dan 11 orang responden (30,6 %) menyatakan pernah melihat polisi lalu lintas membantu korban kecelakaan.

Hal ini menggambarkan bahwa polisi lalu lintas masih memiliki peran penting sebagai tokoh utama yang paling di andalkan dalam urusan serta masalah-masalah lalu lintas. Polisi telah menjalankan peran dengan baik. Sedangkan hanya 1 orang responden (2,7 %) yang menyatakan tidak pernah melihat polisi lalu lintas membantu pengguna jalan lain.

5.3.4. Minat

No.	Ingin Anak Atau Saudara Menjadi Seorang Polisi	Frekuensi	Persentase
1.	Iya	18	50,0
2.	Tidak	18	50,0
Total		36	100,0

Bahwa sebagian responden yaitu sebanyak 18 orang (50,0 %) menyatakan berkeinginan agar anggota keluarganya menjadi seorang anggota polisi lalu lintas, hal ini menggambarkan bahwa profesi sebagai polisi lalu lintas tetap di anggap sebagai profesi yang menjanjikan. Minat masyarakat dalam bidang profesi kerja biasanya di pengaruhi oleh ambisi untuk mendapatkan kekayaan.

5.3.5. Perhatian Khusus

No.	Sengaja Memperhatikan Kinerja Polisi Lalu Lintas	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	20	55.6
2.	Tidak Pernah	16	44.4
Total		36	100.0

Bahwa sebanyak 20 orang responden (55,6 %) menyatakan pernah dengan sengaja memperhatikan kinerja polisi lalu lintas. Menurut hasil wawancara, responden menyatakan pernah dengan sengaja memperhatikan

polisi lalu lintas ketika bertugas dan memberi pelayanan kepada pengguna jalan lain, hal ini disebabkan oleh pengalaman tidak dilayani oleh polisi lalu lintas ketika melapor.

Bahwa dari 12 orang responden yang pernah mengalami kejadian tidak dilayani oleh petugas polisi menyatakan dengan sengaja memperhatikan kinerja polisi sebanyak 6 orang (50,0 %), hal ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga timbul rasa ingin tahu masyarakat tentang kinerja polisi lalu lintas. Namun di sisi lain, sebanyak 6 orang responden (50,0 %) yang pernah tidak dilayani oleh polisi lalu lintas menyatakan tidak pernah dengan sengaja memperhatikan kinerja polisi lalu lintas, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat memilih tidak mau tau dan apatis saja. Masyarakat sudah terbiasa dengan birokrasi dan pelayanan yang kurang ramah dari pemerintah dan institusi jajarannya, sehingga menganggap pelayanan yang tidak baik menjadi hal yang lumrah di Indonesia.

Suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari proses kognitif secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya adalah salah satu faktor terbentuknya persepsi. Semakin banyak informasi yang di dapat tentang polisi lalu lintas, maka akan semakin objektif penilaian yang di berikan oleh responden.

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat di simpukan bahwa :

- Persepsi masyarakat terhadap polisi lalu lintas lebih besar kearah persepsi yang negative, hal ini dapat di buktikan pada saat proses

penilangan, sering terjadi kegiatan sogok menyogok antara polisi lalu lintas dengan pengendara sepeda motor yang terkena tilang.

- Adanya anggapan dari masyarakat bahwa ketika terjadi penilangan, polisi lalu lintas bukan sedang menjalankan tugas, tetapi sedang mencari uang saku tambahan sebagai alternatif pendapatan.
- Disamping adanya persepsi negatif juga terdapat persepsi positif masyarakat terhadap polisi lalu lintas. Persepsi positif hanya dibeikan oleh sebahagian kecil responden
- Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang paling berperan membentuk persepsi masyarakat terhadap polisi lalu lintas adalah faktor pengalaman masyarakat itu sendiri dan pengalaman yang mereka dengar dan lihat dari orang sekitar mereka. Sebanyak 69,4 % responden menyatakan memiliki pengalaman buruk dengan polisi lalu lintas, di ikuti dengan sebanyak 63,9 % responden yang menyatakan pernah melihat perilaku buruk polisi lalu lintas kepada pengendara sepeda motor lain.
- Besarnya perhatian masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas. Terbukti sebesar 55,6 % responden mengaku pernah secara sengaja memperhatikan kinerja polisi lalu lintas, hal ini menunjukkan besarnya keinginan masyarakat agar polisi lalu lintas memunculkan loyalitas mereka dalam memberi pelayanan maupun dalam penindakan pelanggaran.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

- Sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai mitra terdekat masyarakat di jalan raya, polisi lalu lintas harus mampu merebut kembali simpati masyarakat agar fungsi dan tugasnya mendapat dukungan masyarakat.
- Polisi lalu lintas sebagai aparat yang di harapkan mampu meningkatkan penegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tebang pilih dalam penindakan pelanggaran. Polisi lalu lintas tidak harus melakukan tindakan keras dan kasar ketika menjalankan tugas.
- Ternyata masih ada sebagian kecil masyarakat memiliki persepsi positif kepada polisi lalu lintas, dan inilah yang harus di pertahankan dan di tingkatkan oleh polisi. Polisi lalu lintas harus meningkatkan kualitas di berbagai segmen, misalnya di bidang pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam pengurusan surat-surat penting maupun pelayanan yang di butuhkan masyarakat di jalan raya.
- Berdasarkan faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat, faktor pengalaman diri sendiri dan pengetahuan pengalaman orang lain adalah faktor yang paling dominan. Pengalaman seseorang menjadi stimulus bagi dirinya sendiri untuk memberi penilaian.
- Dengan adanya masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tertib lalu lintas, dan dengan adanya perhatian masyarakat akan masalah-masalah yang timbul terkait kinerja polisi lalu lintas, di harapkan

adanya partisipasi masyarakat atau Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) sebagai fungsi kontrol yang menjaga dan mengawasi kinerja polisi lalu lintas dalam hal pelaksanaan.

- Dengan adanya masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tertib lalu lintas, dan dengan adanya perhatian masyarakat akan masalah-masalah yang timbul terkait kinerja polisi lalu lintas, di harapkan adanya partisipasi masyarakat atau Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) sebagai fungsi kontrol yang menjaga dan mengawasi kinerja polisi lalu lintas dalam hal pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Dkk, 2003. *Reformasi, Kajian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Abdulrahman, Agus, 2013. *Psikologi Sosial Dan Integrasi Pengetahuan Dan Empirik*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cohen Bruce J, 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedy Rahmat, 2012. *Konsep Polisi Sebagai Penegak Hukum Dan Pelayanan Masyarakat : Sebuah Metamorfosis*. (<http://fisip.unla.ac.id/>)
- Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi, Ari Ratna Ekawati, 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Heri, P, 1998, *Pengantar Perilaku Manusia*. Penerbit EGC, Jakarta.
- Jiang Rinto, 2009. *Persepsi Psikologi*. Penerbit PT Alex Media

- Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1986. *Psikologi Umum*. Penerbit Kasgoro, Jakarta.
- Leavitt, Harold J, 1978. *Psikologi Manajemen*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, 1988. *Citra Polisi*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasution, S. 2003. *Metode Resech (Penelitian Ilmiah)*. Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Ngadiyono, 1994. *Kelembagaan Dan Masyarakat*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur Kholif Hazin, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penerbit Terbit Terang, Surabaya.
- Pandji Susilo, 2012. *Pos Polisi Untuk Kebenaran*. (<http://pospolisi.wordpress.com>)
- Rakhmat, 2005. *Persepsi Masyarakat Terhadap Birokrasi*. Penerbit Riau Skripsi, Pekanbaru.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1986. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remadja Rosdakarya).
- Rinto, Raharjo, 2013. *Tertib Lalu Lintas*. Penerbit Shafa Media, Jakarta.
- Ronny, hanitijo Soemitra, 2002. *masalah-masalah sosiologi hokum*. Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi Dan Agama*. Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi Lain Cara Polisi Dan Masyarakat Memandang Hukum*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Sukanto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunaryo, 2002. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Penerbit EGC, Jakarta.
- Team Rafa Pustaka, 2010. *Kamus Sosiologi*. Penerbit Rafa Pustaka, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi*. Penerbit , Jakarta.
- Whayudin, Handra. 2007. *Persepsi Masyarakat Terhadap Program Community Develpoment (CD) Pendidikan PT. Medco Eksplorasi dan Produksi (E&P) Indonesia di Desa Lambang Sari I,II Kecamatan Lirik*. Penerbit Riau Skripsi, Pekanbaru.
- Wade Carole, Travis Carole, 2008. *Psikologi Sosial*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Walgito, Bimo, 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Yoyok, Uruk Suyona, 2013. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Yusmar, Yusuf. 1991. *Psikologi Antar Budaya*. Penerbit Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Laporan Bulanan Polsek Tampan Polresta Pekanbaru Periode Bulan Juni 2014
- Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
<http://www.polri.go.id/>